

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupaten Pati, dengan semboyan "Pati Bumi Mina Tani", merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan koordinat $6^{\circ} 25' - 7^{\circ} 00'$ lintang selatan dan $100^{\circ} 50' - 111^{\circ} 15'$ bujur timur, Pati memiliki luas wilayah 150.368 hektare. Pembagian administratifnya yang terdiri dari 21 kecamatan, ratusan desa dan kelurahan, serta ribuan RT dan RW, mencerminkan keragaman budaya dan potensi pembangunan yang dimiliki kabupaten ini. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Pati memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Tengah, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Pati

Visi

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik (Kesejahteraan
Masyarakat dan Pelayanan Publik)

Misi

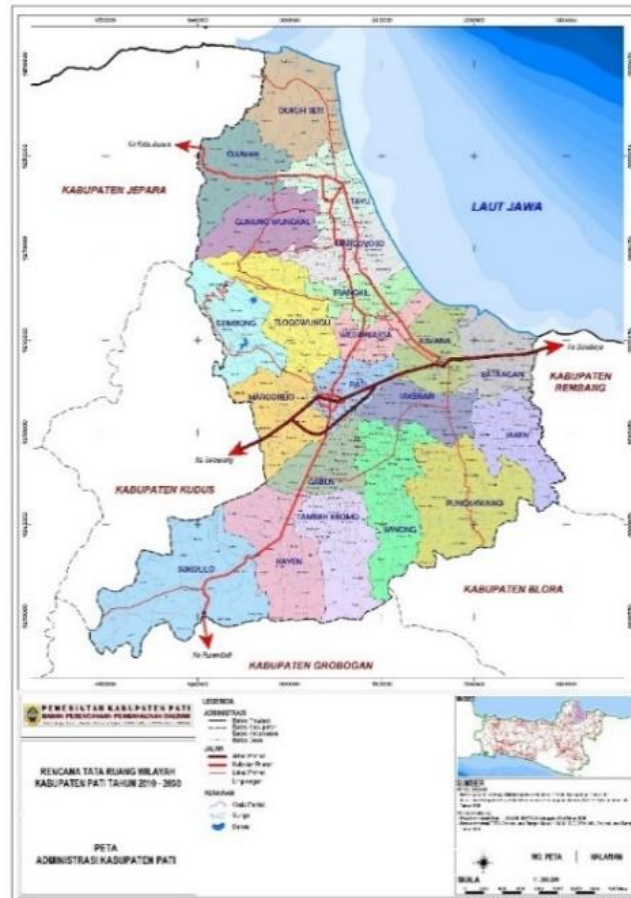
1. Meningkatkan Akhlak, Budi Pekerti sesuai Budaya dan Kearifan Lokal.
(Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti)
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. (Pendidikan dan Kesehatan)

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. (Pengentasan Kemiskinan)
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik. (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)
5. Meningkatkan Pemberdayaan UMKM dan Pengusaha, Membuka Peluang Investasi, dan Memperluas Lapangan Kerja. (Lapangan Kerja)
6. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Perdagangan, dan Industri. (Daya Saing Daerah dan Perumbuhan Ekonomi)
7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah. (Infrastruktur Daerah)
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan. (Lingkungan Hidup)

2.1.2. Kondisi Geografis Kabupaten Pati

Letak geografis Kabupaten Pati yang strategis menjadikan wilayah ini memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya dan Laut Jawa. Di sebelah utara dan timur, Pati berbatasan langsung dengan laut yang memberikan potensi besar dalam sektor perikanan. Sementara itu, bagian selatan dan barat berbatasan dengan daerah-daerah dengan karakteristik geografis yang berbeda. Dengan luas wilayah 150.368 hektare berdasarkan data EPT Tahun 2002, Pati memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dengan luas lahan sawah mencapai 59.332 hektare.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pati



Sumber: <https://www.patikab.go.id/v2/d/2009/09/07/sekilas-pati/>

Kabupaten Pati memiliki bentang alam yang bervariasi, mulai dari lereng Gunung Muria di bagian barat utara hingga dataran rendah yang membentang luas di tengah dan utara. Adanya pegunungan kapur di bagian selatan semakin menambah kekayaan topografi wilayah ini. Dengan curah hujan rata-rata 1.002 mm per tahun dan suhu yang berkisar antara 23°C hingga 39°C, Kabupaten Pati memiliki iklim yang mendukung beragam aktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat. Keragaman

kondisi geografis ini memberikan potensi besar bagi pengembangan berbagai sektor, baik pertanian, pariwisata, maupun industri.

2.1.3. Kondisi Demografis Kabupaten Pati

Demografis merupakan segala hal yang berkaitan dengan kependudukan, seperti jumlah penduduk, kepadatan dan lain-lain yang berkenaan dengan penduduk di suatu wilayah. Kondisi demografis Kabupaten Pati menunjukkan dinamika penduduk yang cukup signifikan. Pertumbuhan penduduk di Pati dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Sebaran penduduk tidak merata, dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di daerah-daerah dengan aksesibilitas yang baik dan potensi ekonomi yang lebih besar.

Kabupaten Pati berdasarkan sensus penduduk secara keseluruhan berjumlah 1.359.364 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Pati menunjukkan sedikit dominasi perempuan dengan jumlah 680.958 jiwa, dibandingkan dengan laki-laki yang berjumlah 678.406 jiwa. Meski demikian, laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,88% per tahun mengindikasikan adanya peningkatan populasi secara keseluruhan. Dengan kepadatan penduduk sebesar 904,02 jiwa per kilometer persegi, dapat disimpulkan bahwa Pati merupakan daerah yang cukup padat penduduknya. Dari total populasi yang ada, terdapat 790.185 penduduk yang termasuk angkatan kerja, serta sebanyak 290.746 bukan angkatan kerja, dengan total 756.270 penduduk bekerja dan 33.915 penduduk tidak bekerja.

Tabel 2.1 Kabupaten Pati dalam Angka

Kecamatan		Penduduk			
		2000	2010	2022	2023
1		2	3	4	5
1	Sukolilo	77.452	84.703	94.404	91.602
2	Kayen	66.505	69.982	81.780	80.855
3	Tambakromo	45.782	47.849	57.614	57.834
4	Winong	53.114	49.201	65.785	68.227
5	Puncakwangi	43.286	41.170	49.411	49.844
6	Jaken	42.449	42.052	47.234	47.203
7	Batangan	38.227	40.847	45.796	45.586
8	Juwana	82.947	90.203	97.507	97.280
9	Jakenan	42.075	40.144	49.206	49.716
10	Pati	98.204	103.060	111.366	109.504
11	Gabus	52.253	51.732	64.411	65.392
12	Margorejo	48.422	55.982	64.244	66.463
13	Gembong	39.360	42.210	48.941	48.780
14	Tlogowungu	47.187	49.088	56.289	55.655
15	Wedarijaksa	54.206	57.594	65.266	65.452
16	Trangkil	56.496	59.266	64.339	64.199
17	Margoyoso	66.739	70.288	75.686	75.129
18	Gunungwungkal	33.819	34.969	38.938	38.610
19	Cluwak	41.116	42.345	48.676	48.660
20	Tayu	64.168	64.318	71.618	71.404
21	Dukuhseti	54.736	56.199	62.557	61.969
Kabupaten Pati		1.148.543	1.193.202	1.361.068	1.359.364

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tahun 2023

Dari sekian banyaknya jumlah penduduk yang bekerja, mata pencaharian terbanyak yang dipilih masyarakat Kabupaten Pati sebagai tempat mereka untuk mencari uang ialah bidang pertanian, perdagangan, perikanan dan kelautan, PNS, dan jasa lainnya. Kabupaten Pati, dengan garis pantai yang cukup panjang, menawarkan beragam peluang dalam sektor perikanan dan kelautan. Meskipun hampir seluruh

wilayah kabupaten ini memiliki aktivitas pengolahan dan pembudidaya ikan, namun terdapat konsentrasi tertentu pada mata pencaharian nelayan di beberapa kecamatan. Sekitar lima kecamatan di Pati diketahui memiliki jumlah nelayan yang cukup signifikan, menunjukkan adanya spesialisasi dalam aktivitas penangkapan ikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Pati memiliki beragam strategi dalam memanfaatkan potensi laut, baik melalui penangkapan langsung maupun kegiatan pasca panen seperti pengolahan dan budidaya.

Kecamatan Juwana di Kabupaten Pati telah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan perikanan dan kelautan di Jawa Tengah. Mayoritas penduduk Juwana menggantungkan hidupnya pada sektor maritim ini. Mulai dari nelayan yang melaut setiap hari untuk menangkap ikan, hingga pelaku usaha pengolahan dan pembudidaya ikan, semuanya berkontribusi pada geliat ekonomi maritim di wilayah ini. Bahkan, kepemilikan kapal pribadi oleh banyak nelayan menjadi bukti kuat betapa lekatnya ketergantungan masyarakat Juwana pada laut. Hasil tangkapan nelayan Juwana pun telah mendunia, dengan TPI Juwana Unit II menjadi pusat transaksi ikan yang ramai dan strategis.

Kecamatan Juwana, dengan keberadaan TPI Juwana Unit I dan II sebagai pusat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Pati, menjadi jantung aktivitas perikanan di Kabupaten Pati. Sekitar 1.268 penduduk Juwana berprofesi sebagai nelayan, menunjukkan dominasi sektor perikanan dalam menyumbang lapangan pekerjaan. Selain nelayan, terdapat pula 216 penduduk yang bekerja sebagai pengolah hasil laut dan 2.537 penduduk yang menjadi pembudidaya ikan. Konsentrasi aktivitas perikanan

yang tinggi di Juwana ini tak lepas dari potensi sumber daya laut yang melimpah serta dukungan infrastruktur perikanan yang memadai.

Tidak hanya Kecamatan Juwana, sektor perikanan juga menjadi tulang punggung perekonomian di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Pati, seperti Batangan, Gabus, Tayu, dan Dukuhseti. Di kecamatan-kecamatan tersebut, nelayan menjadi salah satu pilihan utama mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, pekerjaan sebagai pengolah dan pembudidaya ikan tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, seperti yang terlihat pada data tabel.

Tabel 2. 2 Data Nelayan Pengolah dan Pembudidaya (org) di Kabupaten Pati 2023

No.	Kecamatan	Nelayan	Pengolah	Pembudidaya
1.	Sukolilo	-	144	279
2.	Kayen	-	58	743
3.	Tambakromo	-	45	11
4.	Winong	-	24	10
5.	Pucakwangi	-	0	6
6.	Jaken	-	0	6
7.	Jakenan	-	7	11
8.	Batangan	347	156	1.316
9.	Juwana	1268	216	2.537
10.	Pati	-	77	568
11.	Gabus	126	63	152
12.	Margorejo	-	41	292
13.	Gembong	-	36	122
14.	Tlogowungu	-	43	109
15.	Wedarijaksa	-	42	450
16.	Trangkil	-	2	1.208
17.	Margoyoso	-	23	1.298
18.	Gunungwungkal	-	14	63
19.	Cluwak	-	0	45
20.	Tayu	640	27	1.136

21.	Dukuhseti	1.358	75	1.154
Jumlah		3.739	1.093	11.516

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

2.1.4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pati

Untuk mengembangkan perekonomian daerahnya, Kabupaten Pati berfokus pada pengembangan sector pertanian, industry, kelautan dan perikanan, agribisnis, dan pertambangan. Dengan luas lahan sawah yang cukup besar, Kabupaten Pati memiliki potensi pertanian yang sangat menjanjikan. Produksi berbagai komoditas pertanian, mulai dari padi dan palawija hingga buah-buahan dan hasil perikanan, menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati sangat signifikan, baik dalam harga berlaku maupun harga konstan. Selain itu, keterkaitan sektor pertanian dengan industri sebagai penyedia bahan baku membuka peluang yang luas untuk pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Perkembangan sektor industri di Kabupaten Pati memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Pati yang cukup besar. Berbagai jenis industri, seperti industri kuningan di Juwana, industri tapioka di Margoyoso dan Trangkil, industri batu bata di Trangkil, pabrik gula di Trangkil, industri penambangan pasir di Gunungwungkal, serta industri makanan berskala nasional, telah tumbuh dan berkembang di Pati. Ketersediaan bahan baku lokal dan dukungan infrastruktur menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan sektor industri ini.

Potensi perikanan Kabupaten Pati sangat menjanjikan. Dengan keberadaan sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang aktif, produksi perikanan baik dari laut maupun budidaya air tawar dan payau cukup melimpah. Berbagai jenis ikan hasil tangkapan nelayan dan budidaya tambak tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat lokal, tetapi juga dipasarkan ke daerah lain. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Pati, yang didominasi oleh penambangan pasir di Kecamatan Gunungwungkal dan batu kapur di Kecamatan Sukolilo, tergolong sebagai pertambangan golongan C. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih relatif kecil, yaitu sekitar 0,7% baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sektor pertambangan di Pati belum sepenuhnya tergali.

Skala kegiatan agribisnis di Kabupaten Pati sangat bervariasi. Sebagian besar kegiatan agribisnis masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal. Namun, beberapa komoditas unggulan seperti perkebunan dan perikanan telah berhasil menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi agribisnis di Pati sangat besar dan dapat menjadi sumber devisa bagi daerah.

2.2. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Terletak di Jalan Sudirman No.12, Plangitan, Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Dislautkan) memiliki peran strategis dalam mengelola

potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Pati. Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, Dislautkan bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program di bidang kelautan dan perikanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

2.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 3 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 13, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan

kenelayanan dan sumber daya ikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan untuk melindungi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 18, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudi daya ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 24, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan, dan Bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan, Bina Mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan kawasan Perikanan dan perizinan usaha perikanan, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan Perikanan dan perizinan usaha perikanan, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 29, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi;

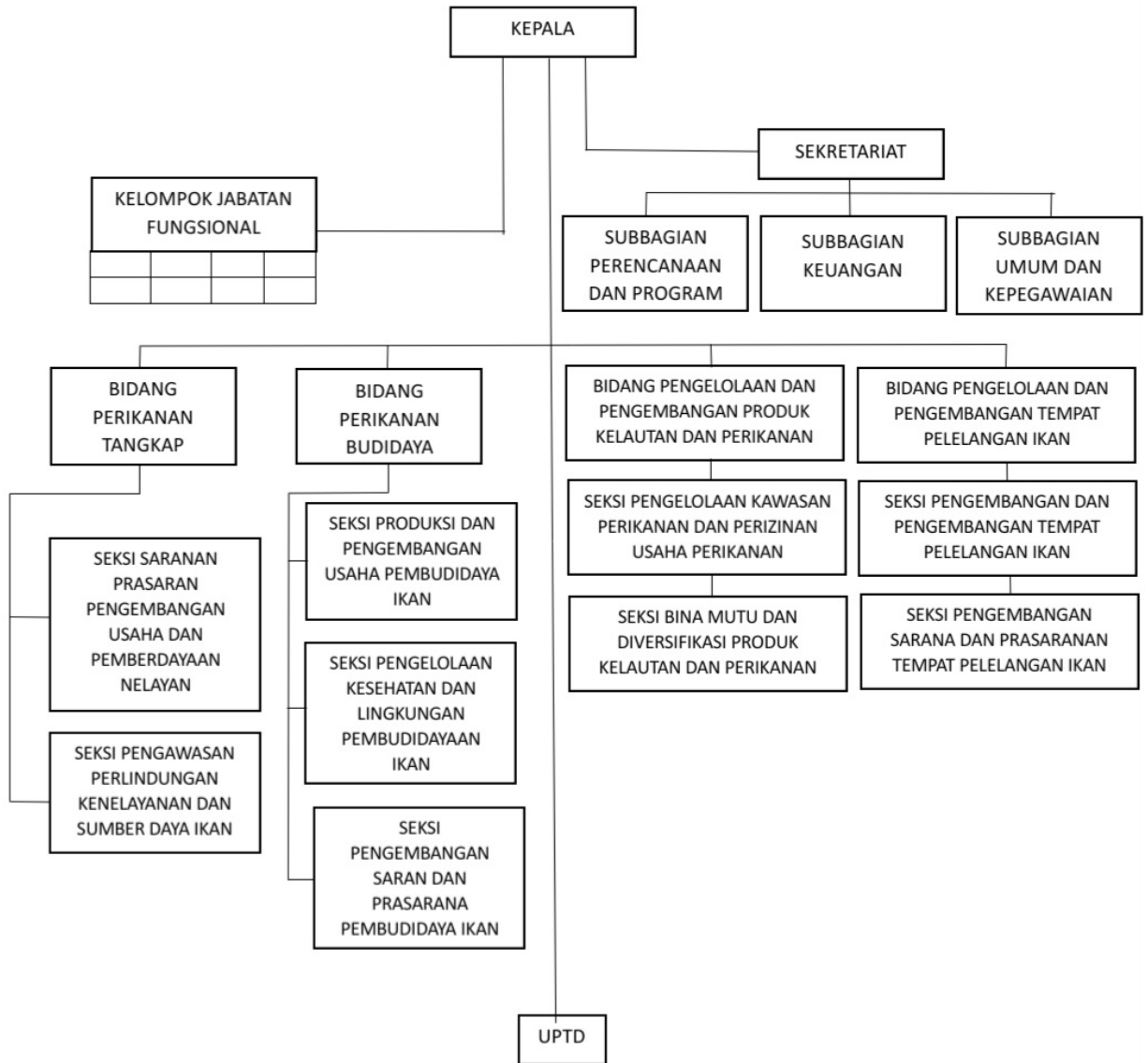
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokoknya dalam mengelola dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Pati. Secara umum, struktur organisasi ini terdiri dari beberapa bidang utama, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan sumber daya laut, dan pengelolaan dan pengembangan TPI. Setiap bidang memiliki tugas dan fungsi spesifik yang saling terkait untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Berikut adalah gambar struktur organisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati



Sumber: Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

2.3. Profil Tempat Pelelangan Ikan Juwana Unit II Kabupaten Pati

Dengan garis pantai sepanjang 60 km dan luas tambak mencapai 10.329 ha, Juwana memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sektor ini, memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Melalui berbagai program seperti pembinaan kelompok nelayan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan, serta pengembangan teknologi budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya meningkatkan produksi perikanan dan kualitas hasil tangkapan, serta menjaga kelestarian sumber daya laut.

Salah satu unsur pelaksana fungsi dan tugas dalam organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas. Dalam hal ini UPTD yang dimaksud salah satunya yakni TPI. Unit organisasi TPI memiliki fungsi dan tugas melelangkan ikan, melakukan penimbangan, melancarkan pungutan, menyetorkan hasil lelang, dan mengamankan, mengatur bongkar muat ikan dan kapal, mengatur penggunaan TPI, menyelenggarakan administrasi lelang, bimbingan pengawasan, serta pengendalian TPI. TPI dikelola langsung oleh Pemerintah yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yakni TPI Juwana Unit I dan II yang letaknya berdekatan.

TPI Juwana Unit II merupakan tempat pelelangan ikan aktif teramai dan besar di Juwana Kabupaten Pati yang secara geografis sisi barat sungai Juwana tepatnya di Desa Bajomulyo, Jalan Hangtuah No. 79. Tempat yang digunakan setiap hari untuk aktivitas yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan ini memiliki luas tanah sebesar 4 Ha TPI kebanggaan Kabupaten Pati ini diresmikan pada 6 September 2000 dengan nama awal Pangkalan Pendaratan Ikan Juwana (Bajomulyo) dan berganti menjadi TPI Juwana Unit II pada tahun 2010. TPI Unit II Juwana memiliki fasilitas pokok atau

utama diantaranya alur pelayaran, 345m luas dermaga, turap 210 meter, serta akses jalan penghubung. Sedangkan fasilitas fungsionalnya seperti gedung kantor, gedung lelang, SPBU, parkir, dock, bengkel, PDAM, PLN, cool room cold storage, maupun central pengolahan.

Diketahui TPI Juwana Unit II sebagai tempat berlabung nelayan di Pati dengan perolehan tangkapan ikan 100-300 ton per hari bahkan lebih dengan nilai transaksi mencapai milyaran, sehingga tak heran jika masuk dalam hasil tangkapan tiga besar secara nasional. Tangkapan yang melimpah ini tak luput dari usaha para nelayan yang melaut (menyang), yang dalam sekali berlayar nelayan dalam kurun waktu berbulan-bulan menggunakan kapal purse seine dan kapalcanting. Nelayan menangkap ikan di wilayah persebaran tidak hanya Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga paling ujung yakni Papua. Hasil tangkapan ikannya pun sangat beragam dari ukuran kecil, sedang, hingga super besar serta berbagai jenis ikan, seperti tenggiri, tongkol, cumi, pari, kerapu, kakap, lonco, layang, pindang, salem, dan lain sebagainya.

2.3.1 Visi dan Misi TPI Juwana Unit II

Visi

Visi dari TPI Juwana Unit II adalah memberikan pelayanan yang prima kepada para pelaku usaha perikanan dalam rangka melaksanakan pembangunan perekonomian perikanan rakyat dan pembangunan perekonomian daerah.

Misi

1. Mendorong para nelayan untuk melelangkan ikan hasil tangkapannya di TPI Juwana Unit II dan mendorong para pedagang turut aktif dalam proses pelelangan ikan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan secara memadai untuk proses pelelangan ikan.
3. Memperlancar jalannya proses dan mekanisme pelelangan ikan.
4. Memfasilitasi proses penanganan hasil perikanan (pasca panen dan pasca lelang) agar terjamin mutu yang tinggi untuk hasil perikanan tangkap.
5. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada para pelaku produksi (nelayan) dan pelaku usaha (bakul ikan dan pengusaha pengolahan) sebelum, selama dan setelah proses pelelangan.
6. Lelang tunai dan mewujudkan kelancaran pembayaran dari transaksi pelelangan ikan.
7. Tidak ada KPLI (kekurangan pembayaran lelang ikan pada bakul dan nelayan).
8. Memaksimalkan pendapatan asli daerah yang diperoleh atas penggunaan jasa sarana dan prasarana TPI yang ada oleh para pelaku usaha perikanan.
9. Membina para pengelola dan karyawan TPI agar memiliki profesionalisme yang tinggi, dedikasi dan handal, sehingga mampu memberikan pelayanan prima.

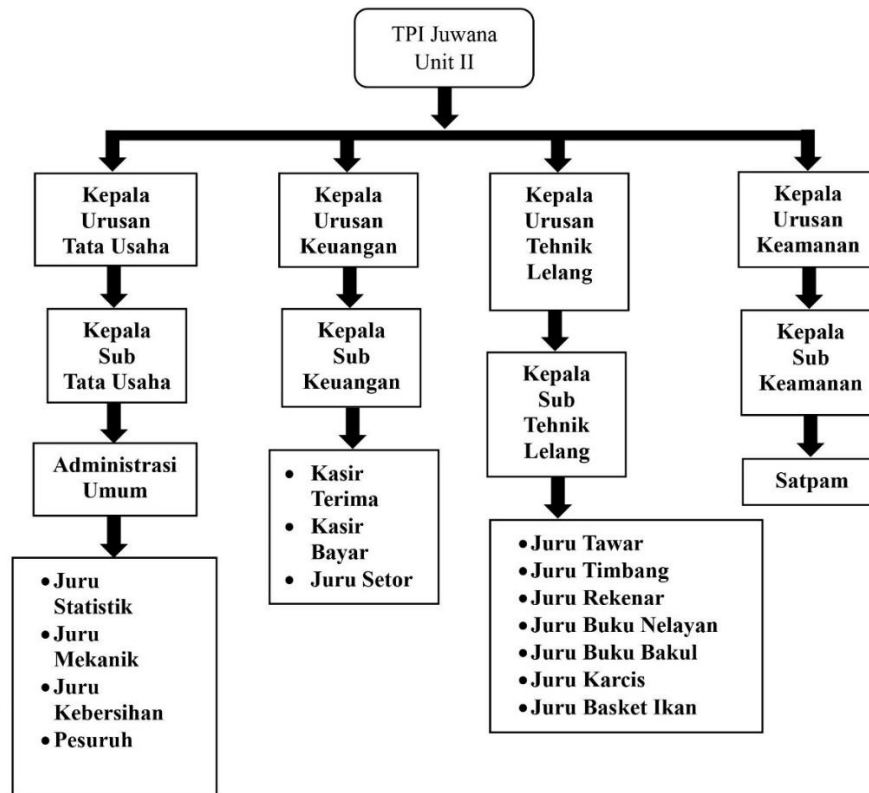
2.3.2. Struktur Organisasi TPI Juwana Unit II

Pelaksanaan lelang ikan di TPI Juwana Unit II mengikuti prosedur yang sangat terstruktur, mulai dari penimbangan dan klasifikasi ikan hingga pembayaran hasil

lelang kepada bakul. Proses ini melibatkan berbagai bagian dan didukung oleh 68 personel dengan beragam keahlian. Mulai dari juru tawar yang menentukan harga, juru timbang yang memastikan keakuratan berat, hingga bagian administrasi yang mengelola data transaksi, setiap personel memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran kegiatan lelang.

Keberadaan 68 personil karyawan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II. Mereka bertanggung jawab atas berbagai tugas, mulai dari penerimaan hasil tangkapan, penimbangan, hingga proses lelang itu sendiri. Dengan latar belakang pendidikan yang beragam, para personil ini mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, sehingga proses pelelangan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi semua pihak terkait. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambar struktur organisasi TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi TPI Juwana Unit II



Sumber: TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati

2.3.3. Tugas Pegawai TPI Juwana Unit II

Dalam menunjang kelancaran aktivitas di TPI terutama lelang ikan yang dalam sehari mencapai puluhan hingga ratusan ton, maka karyawan ataupun pegawai memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan sebagaimana standar pelayanan TPI. Adapun tugas tiap unsur dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana keperluan administrasi dan pelelangan di TPI diantaranya sebagai berikut:

1. Juru Lelang atau Juru Tawar

Juru lelang atau juru tawar adalah seorang individu yang bertugas memimpin dan mengelola proses lelang. Mereka bertindak sebagai fasilitator antara penjual dan

pembeli dalam sebuah transaksi yang melibatkan penawaran harga secara terbuka. Sebagai seorang juru lelang atau juru tawar, persiapan yang matang sangat krusial untuk kelancaran proses lelang. Selain memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seorang juru lelang juga harus menguasai teknik pelelangan, seperti menerapkan metode penawaran meningkat untuk mendapatkan harga terbaik. Penetapan harga dasar yang realistis menjadi langkah awal yang penting dalam memulai proses lelang. Koordinasi yang baik dengan bagian keuangan juga diperlukan untuk memastikan kelancaran transaksi dan pembayaran. Tak kalah penting, juru lelang harus tegas dalam menerapkan aturan, misalnya dengan tidak memberikan kesempatan untuk menawar kepada peserta yang tidak memiliki identitas resmi.

2. Juru Rekenar

Juru rekenar memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pelelangan ikan. Tugas utamanya adalah melakukan penghitungan terhadap hasil lelang setiap nelayan berdasarkan karcis lelang yang mereka miliki. Setelah perhitungan selesai, juru rekenar kemudian membuat Surat Perintah Uang (SPU) sebagai bukti jumlah yang harus dikembalikan kepada nelayan setelah dipotong retribusi sebesar 1,71%. Semua hasil perhitungan ini dicatat secara detail dalam buku nelayan untuk keperluan pelaporan dan verifikasi. Dengan demikian, juru rekenar berperan sebagai penghubung antara nelayan dengan bagian keuangan, memastikan bahwa setiap nelayan mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan hasil tangkapan mereka.

3. Juru Buku Bakul dan Buku Nelayan

Juru buku bakul dan juru buku nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran administrasi pelelangan ikan. Keduanya bertanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi selama proses lelang. Juru buku bakul bertugas mencatat semua karcis lelang yang diperoleh oleh setiap bakul ke dalam buku catatan khusus. Sementara itu, juru buku nelayan mencatat karcis lelang yang sama ke dalam buku catatan nelayan. Dengan adanya pencatatan yang akurat dan terorganisir, baik bakul maupun nelayan dapat dengan mudah melacak hasil lelang mereka. Selain itu, data-data yang tercatat juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan perencanaan kegiatan pelelangan di masa mendatang.

4. Juru Timbang

Juru timbang merupakan salah satu komponen penting dalam proses pelelangan ikan. Setiap harinya, juru timbang memiliki tugas yang sangat krusial, yaitu mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan untuk proses penimbangan ikan yang akan dilelang. Setelah ikan tiba, juru timbang akan melakukan penimbangan dengan cermat dan mencatat hasil penimbangan tersebut ke dalam buku catatan khusus. Buku catatan ini dibuat rangkap dua untuk memastikan adanya bukti yang valid. Lembar pertama akan ditempelkan pada ikan yang telah ditimbang sebagai identitas, sedangkan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip untuk keperluan pelaporan dan verifikasi di kemudian hari.

5. Pelayanan Keuangan

Urusan keuangan di TPI Juwana Unit II didalam pengaturan pelaksanaan adalah menerima dan menyelesaikan pembayaran dari bakul, pembayaran kepada nelayan sesuai dengan haknya, menghimpun, menyimpan dan menyetorkan hasil pungutan sebesar 2,85% kepada instansi terkait, dan melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan. Melakukan koordinasi dan konfirmasi data data lelang dengan urusan teknik lelang guna penyelesaian pembayaran bakul, menghentikan bakul yang belum melunasi pembayaran lelang kemarin.

6. Tata Usaha

Pelayanan tata usaha atau keadministrasian di TPI mencakup berbagai aspek yang sangat penting untuk menunjang kelancaran operasional. Mulai dari penyediaan buku dan blanko administrasi yang dibutuhkan, perawatan serta pengamanan sarana

dan prasarana TPI, hingga pengelolaan administrasi umum seperti daftar hadir, surat menyurat, dan laporan-laporan. Selain itu, tata usaha juga berperan dalam mengurus hak-hak karyawan, mengatur jadwal kerja, serta mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan untuk proses lelang. Tidak hanya itu, koordinasi dan konfirmasi data produksi serta keuangan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas tata usaha, sehingga semua kegiatan di TPI dapat berjalan secara terintegrasi dan efisien.

7. Juru Karcis

Juru karcis berperan sebagai pencatat resmi dalam setiap transaksi pelelangan. Mereka mengisi karcis lelang rangkap dua dengan data yang akurat, termasuk harga tertinggi yang disepakati. Karcis lelang yang telah diisi kemudian diberikan kepada bakul dan nelayan sebagai bukti transaksi. Dengan sistem penomoran yang terorganisir dan informasi yang lengkap, karcis lelang tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, tetapi juga sebagai data penting untuk keperluan pelaporan dan evaluasi kinerja pelelangan.

2.3.4. Pedoman Lelang Terbuka, Tertutup, dan Terbatas

Dalam penyelenggaraan pelelangan TPI Juwana Unit II, ikan yang sering dilelang adalah Lonco, Tongkol, Pindang, Cekak, Sero, Juwi, Jahan, Bukur, Petek, dan lain-lain. Proses jual beli ikan di TPI akan tercipta mekanisme pasar yang sehat apabila berjalan sesuai SOP yang berlaku atau sudah disepakati dan ditetapkan.

Gambar 2. 4 Kondisi Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati



Sumber: Hasil observasi peneliti di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati

Fenomena yang terjadi di TPI Juwana Unit II, kegiatan pelelangan ikannya dilakukan dengan cara lelang terbuka atau non sampel dan lelang terbuka melalui sampel, serta lelang terbatas. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati sebagaimana Perda Nomor 19 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 2 Tentang Tempat Pelelangan Ikan menyatakan bahwasannya kegiatan lelang dilaksanakan secara lelang terbuka, lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran yang terus naik atau meningkat, dan lelang terbatas.

Bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang dapat memberikan kepuasan dan memenuhi keinginan orang pesisir, sekaligus mengelola unit pelaksana

teknis daerah, dalam hal ini adalah TPI, maka pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas. Surat Keputusan ini berisikan tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan lelang ikan di TPI Kabupaten Pati. Berkaitan dengan persyaratan dalam melakukan pelelangan ikan terdapat uraian petunjuk teknis pedoman pelaksanaan lelang, baik syarat lelang ikan terbuka, lelang sampel, dan lelang terbatas adalah sama-sama harus mematuhi atau memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

1. Nelayan, Bakul, dan Karyawan TPI bersedia mematuhi aturan dan tata tertib, yakni Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perbup Nomor 75 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, dan tata tertib yang diterbitkan oleh Kepala TPI.
2. Seluruh Nelayan atau Pengurus Kapal wajib melaporkan dan mencatat hasil tangkapannya di Pos Satpam dan menerima nomor urut lelang.
3. Untuk bakul yang turut serta dalam lelang harus sudah melakukan registrasi, menggunakan tanda pengenalan, dan mengisi surat pernyataan.

Sebagai tambahan berikut syarat untuk melakukan lelang ikan terbuka yakni bahwa minimal 50% hasil tangkapan nelayan dilelang secara terbuka dengan memamerkan keseluruhan ikan yang hendak dilelang di lantai yang sudah disediakan. Untuk syarat lelang terbuka menggunakan sampel persyaratannya adalah maksimal 50% hasil tangkapan nelayan dilelang dengan lelang terbuka melalui sampel dengan

tidak menata keseluruhan ikan, tetapi cukup satu atau dua ekor maupun satu pack (kisaran 10kg) untuk dijadikan sampel dan diletakkan di tempat lelang atau meja yang sudah disediakan, sementara ikan lainnya dapat dimasukkan ke dalam lemari pendingin untuk menjaga kualitas ikan, sekaligus agar lelang efektif dan efisien. Syarat lelang terbuka sampel berikutnya, ikan yang menjadi sampel merupakan ikan sejenis dan memiliki kesamaan kualitas yang setara dengan ikan-ikan lain yang disimpan di *cold storage*. Sementara itu, persyaratan lelang terbatas bahwa maksimal 50% hasil tangkapan nelayan dilelang secara terbatas melalui bantuan pihak TPI yang memfasilitasi, dalam hal ini mempertemukan dua belah pihak antara nelayan atau pengurus kapal dengan satu bakul agar terjalin komunikasi dan menghasilkan kesepakatan bersama.

Demi menjaga transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan lelang, TPI telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini mencakup tata cara pelaksanaan lelang terbuka, lelang terbuka melalui sampel, dan lelang terbatas. Dengan adanya SOP, diharapkan seluruh kegiatan lelang dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun tata cara pelaksanaan atau mekanisme lelang terbuka adalah:

1. Bakul yang sudah teregistrasi melakukan pendaftaran di kasir penerimaan.
2. Bakul lelang memberikan setoran dana deposit ke rekening TPI secara tunai ataupun transfer ke kasir TPI, kemudian transaksi deposite dilanjutkan ke Bank Mitra/ Bank Jateng.

3. Kasir penerimaan membuat Daftar Bakul Peserta Lelang yang sudah melakukan setoran dana deposite dan diserahkan ke juru lelang untuk selanjutnya ditayangkan di layar monitor.
4. Nelayan Pengurus kapal melakukan pendaratan ikan dan lapor ke pos satpam agar mendapatkan nomor lelang.
5. Nelayan/Pengurus kapal melakukan pembongkaran ikan dengan meminjam basket dan diletakkan untuk kemudian ditimbang.
6. Nelayan Pengurus kapal menimbang ikan di Juru Timbang dan minimal 50% tumbangnya diletakkan di lantai.
7. Juru Lelang melakukan lelang ikan sesuai dengan nomor urutan.
8. Juru Lelang menetapkan harga dasar penawaran dan harga terus dinaikkan.
9. Hasil lelang dilakukan pendataan di karcis hasil lelang atau formulir ikan sebanyak 3 rangkap yakni untuk TPI, nelayan, dan bakul.
10. Formulir ikan diserahkan ke Nelayan Pengurus kapal untuk ditagih dan membayar ke Kasir Pengeluaran dengan potongan pembayaran retribusi sebesar 1,71% dari raman.
11. Formulir ikan yang diserahkan ke Bakul untuk dijadikan bukti pengambilan ikan hasil lelang dan menarik sisa dana deosit yang tidak terpakai ke kasir dan membayar retribusi sebesar 1,14% dari raman dan dibuatkan bukti rincian transaksi Bank Mitra.
12. Formulir untuk TPI diarsipkan untuk dijadikan bahan pencatatan produksi, raman, dan retribusi sebagai bahan laporan.

13. Ikan hasil pelelangan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen saat hendak keluar dan diberikan surat jalan oleh pihak TPI.

Berikut Standar Operasional Prosedur lelang terbuka menggunakan sampel:

1. Bakul melakukan registrasi dan mendaftar ke Kasir Penerimaan.
2. Bakul yang mengikuti lelang memberikan setoran dana deposit ke rekening TPI, kemudian ditindaklanjuti Kasir Penerimaan membuat bukti transaksi oleh Bank Mitra.
3. Kasir Penerimaan membuat Daftar Bakul Peserta Lelang kemudian diserahkan ke Juru Lelang agar ditayangkan ke layar monitor.
4. Nelayan Pengurus kapal lapor ke pos satpam dengan menyerahkan ikan per jenis/ekor/per pack (berkisar 10kg) diletakkan di tempat lelang yang tersedia.
5. Maksimal 50% hasil tangkapan nelayan diikutkan lelang terbuka sampel.
6. Bakul mengamati ikan di meja atau lantai lelang.
7. Bakul duduk di kursi yang disediakan pihak TPI.
8. Juru Lelang melakukan lelang ikan sampel, dalam hal ini ikan sampel mewakili ikan yang masih di kapal dalam hitungan tonase atau belum di bongkar dengan jenis dan kualitas ikan tetap sama.
9. Kegiatan lelang dilakukan dengan sistem penawaran yang terus naik atau meningkat dalam satuan per kilogram, yang sebelumnya oleh Juru Lelang lebih dulu telah menetapkan dasar harga penawaran.
10. Bakul yang memberikan penawaran harga tertinggi atas sampel ikan yang ditampilkan akan dinyatakan sebagai pemenang. Setelah dinyatakan sebagai pemenang, bakul akan diberikan karcis lelang atau formulir ikan sebagai bukti kepemilikan atas seluruh ikan yang dilelang dalam lot tersebut.

11. Karcis lelang atau formulir ikan diserahkan ke Kasir Penerimaan sebagai tanda tukar SPB (Surat Pembayaran Bakul) dengan menghitung deposit bakul dan pembayaran retribusi 1,14% dari raman transaksi oleh Bank Jateng.
12. Bakul yang memenangkan lelang memberikan SPB ke Juru Timbang untuk kemudian ditukar dengan ikan.
13. Juru Timbang lapor ke Nelayan Pengurus kapal dengan membawa bukti SPBI (Surat Permintaan Bokar Ikan) dan dibuatkan dua rangkap, satu untuk Nelayan/Pengurus kapal dan satu rangkap sebagai arsip TPI.
14. Sebelum dibawa oleh armada keluar TPI oleh bakul yang menang lelang, ikan ditimbang beratnya disesuaikan dengan yang tercantum dalam SPBI.
15. Nelayan memperoleh bayaran hasil lelang ikannya dengan menemui Kasir Pengeluaran dengan menunjukkan SPU (Surat Permintaan Uang), yang sudah dipotong untuk bayar retribusi 1,71% dari raman, kemudian dibuatkan rincian transaksi oleh Bank Mitra.
16. Ikan hasil lelang diberikan surat jalan dari petugas TPI dan akan dilakukan pemeriksaan ketika hendak keluar dari TPI oleh satpam.

Pelaksanaan lelang terbatas tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Nelayan/Pengurus kapal lapor dan mencatat jumlah, jenis ikan hasil tangkapan di pos satpam.
2. Maksimal 50% hasil tangkapan nelayan dapat dilelang dengan lelang terbatas.

3. Juru Lelang melakukan mediasi dan memberikan fasilitas dalam mempertemukan antara nelayan pengurus kapal dengan bakul agar tercipta komunikasi dan terjadi kesepakatan harga.
4. Ketika kesepakatan tercapat dan dua belah pihak sudah deal, Petugas TPI/ Juru Lelang menyerahkan karcis atau formulir ikan, untuk selanjutnya diberikan kepada Juru Timbang agar memperoleh SPBI dan ikan bisa dibawa armada keluar TPI.
5. Petugas keuangan/Kasir TPI membuat rincian transaksi keuangan yang sebelumnya sudah dilakukan di Bank Mitra.
6. Nelayan Pengurus kapal membayar retribusi sebesar 2.85% dari raman ke kasir atau petugas lewat Bank Jateng.
7. Ikan yang sudah dilelang diperiksa kelengkapan dokumen saat akan dibawa keluar TPI oleh satpam dan diberikan bukti surat jalan oleh Petugas.

2.3.5. Perkembangan Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati

Sebagai tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Pati, TPI Juwana Unit II mampu menghasilkan tangkapan ikan sebanyak 19.083.717 kg yang kemudian dilelang sehingga menghasilkan raman nelayan sebesar Rp 213.501.710.000,- dan memberikan retribusi kepada Kabupaten Pati sebanyak Rp 6.063.448.564,- pada tahun 2023. Besarnya produksi perikanan laut yang dihasilkan nelayan dan dijual di TPI Juwana dipengaruhi oleh beberapa hal, baik dari nelayan, TPI, dan cuaca. Produksi perikanan laut meningkat ketika nelayan berlayar dalam jangka waktu yang relatif lama

dan tepat ketika memasuki musim panen ikan. Dengan letak yang strategis dan fasilitas yang memadai dari TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati akan menarik minat nelayan untuk menjual ikan disana daripada TPI yang lain. Serta, cuaca yang kondusif akan memengaruhi lama waktu nelayan untuk berlayar mencari ikan di laut.

Tabel 2.3 Jumlah Produksi Perikanan Laut TPI Juwana Unit II

No.	Tahun	Tangkapan (Kg)	Raman Nelayan (Rp)	Retribusi (Rp)
1.	2010	22.604.669	132.133.870.000	3.765.815.295
2.	2011	28.205.722	176.226.440.000	5.022.453.540
3.	2012	30.855.942	170.338.270.000	4.854.640.695
4.	2013	15.151.117	132.411.720.000	3.773.734.020
5.	2014	5.540.422	49.297.832.567	1.404.988.228
6.	2015	17.380.856	184.544.340.000	5.262.363.690
7.	2016	17.480.856	184.644.340.000	5.262.363.690
8.	2017	14.774.434	198.343.888.000	5.652.800.833
9.	2018	16.696.814	208.974.840.000	5.964.189.940
10.	2019	22.691.532	223.370.652.000	6.368.063.582
11.	2020	24.485.429	250.545.400.000	7.140.543.900
12.	2021	26.819.772	302.561.950.000	8.623.015.575
13.	2022	17.781.482	250.538.020.000	7.140.333.570
14.	2023	19.083.717	213.501.710.000	6.084.798.735

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati 2010-2023

TPI Juwana Unit II merupakan versi baru dari TPI Juwana I yang telah dilengkapi sarana dan prasarananya. Berbeda dengan TPI Juwana I yang hanya melakukan pelelangan ikan dalam jumlah kecil, TPI Juwana Unit II melakukan pelelangan dalam jumlah besar dengan kapal yang datang dari berbagai perairan di Nusantara. Oleh karena itu, sejak berdirinya TPI Juwana Unit II pada tahun 2000 dan bergantinya nama dari TPI Bajomulyo menjadi TPI Juwana Unit II pada tahun 2010, diketahui bahwa hasil produksi penjualan lelang mampu mencapai angka puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Mengacu pada data yang tertera pada tabel 2.3, diketahui bahwa produksi tangkapan ikan yang dilelang di TPI Juwana Unit II tidak selalu mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi pada kurun waktu tahun 2010-2012 mengalami peningkatan produksi tangkapan ikan kurang lebih sebesar 8.000.000 kg, namun kemudian hingga pada tahun 2014 mengalami penurunan produksi tangkapan ikan sebesar kurang lebih 25.000.000 kg. Hal ini juga terjadi pada periode tahun 2019-2023 yang mengalami peningkatan kemudian turun kembali secara perlahan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.